

KEPEMIMPINAN DALAM PANDANGAN FILSUF ARAB (STUDI KITAB *MUQADDIMAH* KARYA IBNU KHALDUN)

Inayatul Mas'adah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
inayah.9611@gmail.com

Diterima 21 Oktober 2021 | Direview 25 Desember 2021 | Diterbitkan 30 Desember 2021

Abstract

One of the great Muslim philosophers whose name is still considered to this day is Ibn Khaldun. Many important ideas of his thinking are contained in his work Muqaddimah, one of which is about leadership. His fairly mature experience in the world of practical politics made him have a mature understanding of the concept. In this article, Ibn Khaldun's thoughts on leadership will be reviewed. From the analysis that the author did, this study obtained the result that according to Ibn Khaldun leadership is something that must exist and in accordance with the teachings of Islam. According to him, leadership can be achieved through the existence of supremacy achieved with fanaticism through asabiyyah. In addition to asabiyyah, religion also plays a role in the establishment of leadership. In fact, the solidarity produced by religion is much stronger than that produced only by asabiyyah. In addition, Ibn Khaldun also gave some criteria for a leader, including having knowledge, being able to do justice, competent, physically and spiritually healthy, and having a lineage from the tribe of Quraisy.

Keyword: Leadership, Ibnu Khaldun, Muqaddimah

Abstrak

Salah satu filsuf besar muslim yang namanya masih diperhitungkan hingga saat ini ialah Ibnu Khaldun. Gagasan penting pemikirannya banyak tertuang dalam karyanya Muqaddimah, salah satunya tentang kepemimpinan. Pengalamannya yang cukup matang terjun dalam dunia politik praktis menjadikannya memiliki pemahaman yang matang atas konsep tersebut. Dalam tulisan inilah nantinya pemikiran Ibnu Khaldun tentang kepemimpinan akan diulas. Dari analisis yang penulis lakukan, penelitian ini memperoleh hasil bahwa menurut Ibnu Khaldun kepemimpinan merupakan suatu hal yang wajib ada dan sesuai dengan ajaran Islam. Menurutnya, kepemimpinan dapat diraih melalui adanya supremasi yang dicapai dengan fanatisme melalui asabiyyah. Di samping asabiyyah, agama juga berperan dalam tegaknya kepemimpinan. Bahkan, solidaritas yang dihasilkan oleh agama jauh lebih kuat dibandingkan yang hanya dihasilkan oleh asabiyyah. Selain itu, Ibnu Khaldun juga memberikan beberapa kriteria bagi seorang pemimpin, di antaranya memiliki ilmu pengetahuan, mampu berbuat adil, berkompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki garis keturunan dari suku Quraisy.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Ibnu Khaldun, Muqaddimah

Pendahuluan

Ibnu Khaldun adalah seorang ilmuwan Arab abad keempat belas sekaligus pelopor di bidang sains dan politik yang berhubungan dengan kebangkitan, pertumbuhan, serta keruntuhan masyarakat dan peradaban.¹ Sosoknya tak hanya dikenal sebagai seorang filsuf. Ibnu Khaldun juga diakui sebagai seorang sejarawan dan sosiolog besar pada zamannya. Salah seorang guru besar sosiolog di Universitas of Aberdeen, Dr. Bryan S. Turner, bahkan menyatakan bahwa tulisan-tulisan Ibnu Khaldun tentang sejarah dan ilmu sosial merupakan satu-satunya dari tradisi intelektual Arab yang diterima dan diakui di dunia Barat, terutama oleh ahli-ahli sosiologinya. Bahkan, beberapa ahli menyebut bahwa Ibnu Khaldun adalah Bapak Ekonomi (*father of economics*) yang sebenarnya atau juga Bapak Ilmu Sosial Modern (*father of modern social sciences*), serta mengklaim bahwa ide-ide yang digagas olehnya dicetuskan kembali empat abad kemudian oleh para pemikir Barat. Tokoh-tokoh seperti Adam Smith atau David Ricardo, kemudian Karl Marx atau John Maynard Keynes, dalam gagasan yang

¹I.P. Gupta, "Conceptualising 'The Urban': Ibn-Khaldun And The Urban Settlements In Medieval India With Special Reference To The 16th And 17th Century", *Proceedings of the Indian History Congress*, vol. 50, 1989, 344.

dikemukakannya, dinilai telah terilhami oleh pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun.² Tak hanya itu, oleh A. Pitirim Sorokin, Ibnu Khaldun sebagai seorang pemikir juga disejajarkan dengan Plato, Aristoteles, Giambattista Vico, dan St. Thomas Aquinas.³ Kemasyhuran Ibnu Khaldun itu tidak lepas dari penguasaannya yang mendalam atas keilmuan-keilmuan tersebut. Ia merupakan seorang ahli yang memiliki keluasan pengetahuan sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa ia adalah makhluk yang paling penting dan terhormat di alam semesta.⁴

Nama besar Ibnu Khaldun juga masuk dalam jajaran para pemikir besar di dunia Arab. Ia sendiri mungkin adalah sosok yang paling sering dibicarakan, bahkan di kalangan kolumnis surat kabar.⁵ Kebesaran namanya tersebut tidak lepas dari karya-karyanya yang fenomenal. Salah satu karya besarnya antara lain ialah *Muqaddimah*.⁶ Oleh Ibnu Khaldun sendiri, kitab ini diklaim sebagai karya besarnya yang komprehensif. Dengan adanya karya ini, Ibnu Khaldun mengharapkannya untuk dapat menjadi penjaga hikmah sekaligus wadah sejarah. Dalam karyanya tersebut ia menulis:

*Thus, (this work) contains an exhaustive history of the world. It forces stubborn stray wisdom to return to the fold. It gives causes and reasons for happenings in the various dynasties. It turns out to be a vessel for philosophy, a receptacle for historical knowledge. The work contains the history of the Arabs and the Barbers, both the sedentary groups and the nomads. It also contains references to the great dynasties that were contemporary with them, and moreover, clearly indicates memorable lessons to be learned from early conditions and from subsequent history.*⁷

Pada akhirnya, kitab ini pun menyajikan sesuatu yang unik dengan kandungannya yang tidak biasa dan tidak seakrab pengetahuan-pengetahuan dalam kitab lainnya yang telah umum diketahui oleh masyarakat, termasuk juga atas kandungan kebijaksanaan (hikmah) yang tersembunyi di dalamnya.⁸

Muqaddimah karya Ibnu Khaldun bisa dibilang adalah suatu kitab kehidupan. Gagasan tentang gerakan progresif orang-orang Badui yang dinamis dan murni datang dari padang pasir dan gunung untuk menggulingkan dinasti perkotaan, yang berwatak malas dan korup, pada gilirannya adalah salah satu tema utama dalam *Muqaddimah* Ibnu Khaldun yang ditulis pada abad keempat belas. Ibn Khaldun menekankan bahwa kekuatan *asabiyya* ("perasaan kelompok" atau "solidaritas kelompok") di antara orang Badui memungkinkan mereka untuk menggulingkan pemerintahan yang berorientasi kota yang malas dan berorientasi pada kemewahan, terutama ketika *asabiyya* bersatu dengan rasa keislaman.⁹

Pemikiran Ibnu Khaldun terbentuk dari kondisi sosio-kultural yang terjadi pada zamannya. Karyanya, *Muqaddimah*, merupakan perasan dari hasil renungan teoritisnya, sekaligus merupakan pengalaman empirisnya sebagai tokoh yang terlibat langsung dalam

²Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, terj. Masturi Irham, dkk., (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), xiv–xv.

³Pitirim. A. Sorokin, *Sociological Theories of Today*, (New York and London: Harper & Row, 1966), 308.

⁴Kamaruddin, "Pemikiran Politik Ibnu Khaldun Dan Pembentukan Teori Sosiologi Politik", dalam *Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah*, vol. 16, no. 2, 2015.

⁵Cengiz Tomar, "Between Myth and Reality: Approaches to Ibn Khaldun in the Arab World", dalam *Asian Journal of Social Science*, vol. 36, no. 3–4 January 2008, 590.

⁶Karya *Muqaddimah* Ibnu Khaldun selesai ditulis pada tahun 1377. Karya ini pertama kali dijumpai dalam bentuk cetaknya pada tahun 1858 di Paris dan diedit oleh Etenne Marc Quatremere. Edisi buku ini dalam Bahasa Inggris diterjemahkan oleh Franz Rosenthal. Lihat Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Ibn Khaldun Dalam Pandangan Penulis Barat Dan Timur*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

⁷Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction To History The Classic Islamic History of the World Translated by Franz Rosenthal*, (Princeton University Press, t.th.), 58.

⁸Briton Cooper Busch, "Divine Intervention in the 'Muqaddimah' of Ibn Khaldun", dalam *History of Religions*, vol.7, no. 4 (1968): 318.

⁹Nicholas S. Hopkins, "Engels and Ibn Khaldun / إنغلز وابن خلدون", dalam *Alif: Journal of Comparative Poetics*, no. 10, 1990, 10.

dinamika politik Afrika Utara dan Granada.¹⁰ Dalam karyanya ini, Ibnu Khaldun mengamati betul bagaimana fluktuasi kepemimpinan dan kekuasaan dari masa ke masa. Konsep *asabiyya* Ibnu Khaldun, serta pandangannya atas naik turunnya peradaban seperti yang diuraikan dalam teorinya yaitu *‘umran*, di mana ia mengulas tentang konsepsi negara yang mengikuti dinamika internal, diketahui telah mempengaruhi generasi sejak akhir abad keenam belas. Untuk tingkat tertentu, elit Ottoman pada abad keenam belas hingga abad kesembilan belas juga mengadopsi pandangan Ibnu Khaldun tentang sejarah dan politik. Bahkan, ada beberapa penelitian modern yang dilakukan terhadap dampak Ibnu Khaldun pada para intelektual Ottoman ini juga. Namun, peran yang dimainkan oleh pemikir muslim yang penting dalam perjuangan politik dari lingkungan Ottoman ini belum cukup mendapat perhatian.¹¹

Sebab keistimewaannya, kitab *Muqaddimah* karya Ibnu Khaldun menarik perhatian para sarjana baik muslim maupun non-muslim untuk mendalami dan mengkaji kitab tersebut. Di antara penelitian modern yang pernah dilakukan ialah karya Nurullah Ardic. Ia menghubungkan antara konsep *asabiyya*¹² Ibnu Khaldun dan konsep genealogi sebagai syarat untuk menjadi pemimpin. Artikel karya Ardic ini mencoba menguji kontribusi Ibnu Khaldun atas perdebatan politik pada masa Kekhalifahan Ottoman. Dalam karyanya tersebut, Ardic mendiskusikan salah satu hadis Nabi SAW. yang sering menjadi perdebatan sekaligus merupakan salah satu teori politik Islam awal, yang menyatakan bahwa seorang pemimpin haruslah berasal dari suku Quraisy. Bagaimana penafsiran Ibnu Khaldun atas hadis tersebut dan kecocokannya dalam konteks kekhalifahan Ottoman mencoba dianalisa olehnya. Ardic menyebut, sementara nasionalis Arab menekankan latar belakang etnis pemimpin sebagai pra-syarat mendasar untuk menjadi khalifah, pendukung Ottoman memilih untuk mengadopsi teori Ibnu Khaldun sebagai gantinya, yang menekankan *asabiyya* sebagai aturan memilih khalifah, bukan silsilah atau afiliasi suku¹³

Masih berfokus pada *asabiyya* dan kepemimpinan, karya-karya yang mengulas tentang Ibnu Khaldun juga sudah pernah muncul sebelumnya. Di antaranya adalah artikel yang berjudul "İbn Khaldun's Concept of "Assabiya": An Alternative Tool for Politics?". Artikel ini ditulis oleh M. Akif Kayapınar dan dipublikasikan dalam *Asian Journal of Social Science*.¹⁴ Artikel ini membahas tentang konsep Ibnu Khaldun atas *asabiyya* dengan fokus pada tindakan politik kolektif, yang secara langsung mengarah pada pembentukan suatu negara. Perhatian penulis dalam artikel ini terletak pada asal *asabiyya* sebagai keseluruhan istilah teknis pengembangan keseluruhan karya *Muqaddimah*. Lain halnya yang dilakukan oleh Korkut dengan karyanya yang berjudul "İbn Khaldun's Critique of the Theory of "al-Siyasah al-Madaniyyah".¹⁵ Di dalam artikel ini, penulis menguji tentang metode yang diajukan oleh Ibnu Khaldun mengenai hal sosial dan politik. Filsafat politik yang sebelumnya dimulai oleh al-Farabi sebagai gaya sistematis dalam pemikiran Islam menggunakan deduksi sebagai

¹⁰Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektual Islam Di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1993), 108.

¹¹Nurullah Ardic, "Genealogy or Asabiyya? Ibn Khaldun between Arab Nationalism and the Ottoman Caliphate", dalam *Journal of Near Eastern Studies*, vol. 71, no. 2, 2012, 315.

¹²*Asabiyya* sendiri merupakan term yang dipakai secara menyeluruh dalam *Muqaddimah*. Meskipun Ibnu Khaldun sendirilah yang pertama kali mengkonsepkan term tersebut, namun ia sendiri tidak menjelaskan secara gamblang definisinya. Kebanyakan pendefinisianya dikembangkan sendiri oleh para pengkajinya. Penggunaannya sendiri secara konvensional diasosiasikan dengan kehidupan orang Badui dan kabilah-kabilah yang keduanya lekat dengan sejarah Arab kuno. Lihat M. Akif Kayapınar, "İbn Khaldun's Concept of 'Assabiya': An Alternative Tool for Understanding Long-Term Politics?," dalam *Asian Journal of Social Science*, vol. 36, no. 3-4, 2008, 379.

¹³Nurullah Ardic, "Genealogy or Asabiyya? Ibn Khaldun between Arab Nationalism and the Ottoman Caliphate", 315.

¹⁴M. Akif Kayapınar, "İbn Khaldun's Concept of Assabiyya: An Alternative Tool for Understanding Long-Term Politics", dalam *Asian Journal of Social Science*, vol. 36, no. 3-4, January 2008.

¹⁵Şenol Korkut, "İbn Khaldun's Critique of the Theory of 'al-Siyâsah al-Madaniyyah'", dalam *Asian Journal of Social Science*, vol. 36, no. 3-4, 2008.

bagian tradisi filosofis. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa metode ini tidak cukup untuk menjelaskan fenomena sosial dan kejadian-kejadian di dalamnya. Ide Ibnu Khaldun tentang hal inilah yang kemudian dibahas oleh penulis dalam artikel tersebut.

Salah satu gagasan penting Ibnu Khaldun dalam karyanya, *Muqaddimah*, adalah tentang konsep kepemimpinan. Pengalamannya terjun ke dalam politik praktis dalam waktu yang cukup panjang menjadikannya memiliki pemahaman yang matang atas konsep tersebut. Perjalanan hidupnya yang berpindah-pindah mulai dari Maroko, Andalusia, hingga Mesir juga telah memperkaya khasanah keilmuannya dengan menyaksikan secara langsung beragam kondisi politik yang cukup rumit. Di dalam tulisan inilah nantinya pemikiran Ibnu Khaldun akan diulas secara mendalam. Ulasan-ulasan tersebut diperoleh melalui kajian pustaka dengan menganalisis karya-karya Ibnu Khaldun khususnya *Muqaddimah Ibnu Khaldun*.

Untuk mengkaji pemikiran Ibnu Khaldun ini, akan digunakan metode kualitatif sehingga diperoleh analisis yang mendalam. Metode ini didasari oleh sudut pandang yang beranggapan bahwa setiap fenomena merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan beberapa faktor saja. Fenomena-fenomena yang ada dapat dijelaskan dengan menggunakan sekumpulan faktor yang mewakili fenomena (reduksionis) dan faktor sebab menentukan atau mempengaruhi faktor akibat dari fenomena tersebut (deterministik).¹⁶ Dengan demikian, fokus kajian tentang bagaimana konsep kepemimpinan Ibnu Khaldun akan terjawab.

Melihat tulisan-tulisan sebelumnya, timbul pertanyaan tentang bagaimana ide pemikiran Ibnu Khaldun tentang kepemimpinan. Mengingat latar belakangnya di samping merupakan seorang filsuf, ia juga merupakan seorang negarawan ulung. Menurut hemat penulis, pertanyaan ini penting untuk dipaparkan lebih lanjut. Khususnya dengan menggali ide-ide pemikirannya melalui karya-karya agungnya. Konsep kepemimpinan inilah yang akan dikaji dalam tulisan ini.

Biografi Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap 'Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Maghribi Al-Hadrami Al-Maliki. Adapun gelarnya adalah *Wali ad-Din "Guardian of the Religion"*. Ia lahir di Tunisia pada awal Ramadhan tahun 732 H bertepatan dengan tanggal 27 Mei 1332 M dan wafat di Mesir pada 1406 M.¹⁷ Keluarga besarnya merupakan keturunan Arab yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Nasab keislaman Ibnu Khaldun sendiri kembali kepada Wail bin Hujr, seseorang sahabat nabi yang pernah didoakan oleh beliau agar mendapat limpahan berkah pada saat kedatangannya di tahun *al-Wufulud*¹⁸ untuk menyatakan masuk Islam. Ibnu Khaldun diyakini telah berpindah ke Spanyol pada abad ke delapan, pada tahun-tahun awal penaklukan Islam. Kakeknya, Khalid Ibnu Utsman, dan keluarganya sempat menetap beberapa saat di Carmone sebelum berpindah ke kota Sevilla.¹⁹

Ibnu Khaldun lahir dalam suasana politik yang sedang dihadapkan pada konflik. Ketika kekaisaran Almohades mengalami kemunduran dan satu demi satu kota-kotanya jatuh ke tangan Raja Castille, Emir Abu Zakaria, cucu Abu Hafs beremigrasi ke Tunis pada tahun 620 H dan menyatakan diri sebagai penguasa. Bani Khaldun meninggalkan Seville sebelum jatuh ke tangan orang-orang Kristen dan menetap untuk sementara waktu di Ceuta di mana gubernurnya yang merupakan seorang Hafsite, menyambut mereka. Kepala keluarga

¹⁶Jusrin Efendi Pohan, "Mengakar Karya Ilmiah (Menulis Skripsi Kualitatif, Kuantitatif, Dan Penelitian & Pengembangan)", dalam *Logaritma: Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Sains*, vol. 4, no. 01, Juni 2016.

¹⁷Ahmed Alrefai dan Michael Brun, "Ibn Khaldun: Dynastic Change And Its Economic Consequences", dalam *Arab Studies Quarterly*, vol. 16, no. 2, 1994, 73.

¹⁸Tahun *al-Wufulud* (atau dikenal dengan '*am al-wufulud*') adalah tahun pada saat datangnya berbagai delegasi suku yang ada di Timur Tengah ke Madinah untuk menyatakan diri bergabung atau menyatakan diri memeluk agama Islam kepada Rasulullah SAW. yang terjadi pada tahun ke-9 H. Lihat Khalil Abdul Karim, dkk., *Negara Madinah: Politik Penaklukan Masyarakat Suku Arab*, terj. Kamran As'ad Irsyady, (Yogyakarta: LKIS, 2005).

¹⁹Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction To History The Classic Islamic History of the World Translated by Franz Rosenthal*, 826.

saat itu, Al-Hasan ibn Muhammad ibn Khaldun, kakek keempat sang sejarawan, mengikuti Abu Zakaria, di mana ia memperoleh perlindungan dan kemegahannya. Pada saat kematian Emir Zakaria, ia digantikan oleh putranya al-Mustansir, kemudian oleh putranya, Yahia dan kemudian oleh saudaranya, Abu Ishaq. Sementara itu, Bani Khaldun menikmati otoritas dan kemewahan. Pada zaman Abu Ishaq, Abu Bakr Muhammad ibn Khaldun, kakek buyut sang sejarawan, diangkat menjadi menteri, dan putranya Muhammad menjadi bendahara untuk sementara waktu bagi Abu Faris, putra dan pangeran mahkota Abu Ishaq, yang pada waktu itu adalah penguasa Bougie.

Belakangan, otoritas Bani Hafs diguncang, dan seseorang bernama Ibnu Abi Emara memberontak dan kemudian menduduki Tunis serta menangkap Abu Bakar ibn Khaldun, membunuhnya dan menyita hartanya. Putranya, yaitu Muhammad, tetap berada di istana Bougie, dan mengambil bagian dalam pertempuran yang kemudian berkobar antara Bani Hafs dan para pemberontak yang kemudian menduduki berbagai jabatan di bawah Bougie. Kepala Almohades, Emir Abu Yahia al-Lihyani, kemudian menaklukkan Tunis pada tahun 711 H. dan mengangkatnya sebagai bendahara untuk sementara waktu. Dia kemudian pensiun dari kehidupan publik, tetapi dia mempertahankan posisi dan pengaruhnya di negara bagian sampai dia meninggal pada 737 H. Adapun putranya, Muhammad, Ibnu Khaldun, dia tidak memiliki ketertarikan untuk berpolitik dan lebih memilih kehidupan untuk mengkaji ilmu, yang unggul dalam bidang hukum, filologi dan puisi. Dia meninggal dalam wabah besar di 749 H. meninggalkan beberapa anak. Selain Ibnu Khaldun, hanya Yahia, yang kemudian menjadi menteri yang terkenal.²⁰

Kepemimpinan dalam Perspektif Islam

Apabila menengok kembali sejarah, tentunya kita akan menjumpai nama-nama bangsa atau suku yang besar seperti bangsa Persia, bangsa Arab, bangsa Yunani, suku Quraisy, atau suku-suku yang lainnya. Sepanjang sejarah, sebagian besar manusia atau bahkan hampir seluruhnya menjalani kehidupan secara berkelompok, baik dalam kelompok besar maupun kelompok kecil yang kemudian menciptakan suatu masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya bangsa-bangsa dengan identitas yang berbeda-beda, atau kelompok-kelompok suku yang lebih kecil. Hal ini telah muncul semenjak kelahiran Islam, bahkan jauh sebelum itu. Timbulnya kelompok masyarakat ini disebabkan karena adanya kebutuhan antara satu dengan yang lainnya, kebutuhan akan keamanan, dan kebutuhan akan kepemimpinan.²¹

Adanya bangsa atau suku yang besar tidak lepas dari sosok pemimpinnya. Hal tersebut menjadi suatu keniscayaan. Sebab, di tangan pemimpin itulah ujung tombak penentu kejayaan kelompoknya. Adanya pemimpin juga berfungsi untuk menjaga stabilitas. Masing-masing individu dari suatu kelompok tidak semuanya memiliki kepentingan yang sama. Secara naluri, orang-orang akan berusaha meraih apapun agar kepentingannya tercapai. Untuk mendapatkan hal itu, seringkali terjadi kompetisi antar sesama. Dengan demikian, untuk menghindari konflik dan terjaganya harmonisasi kehidupan, maka dibutuhkan adanya konsensus dan seseorang yang dipatuhi bersama.

Adanya suatu kepemimpinan memiliki tujuan yang sangat penting. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibnu Taymiah dalam kitabnya bahwa setidaknya kepemimpinan memiliki dua tujuan. Tujuan tersebut yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dalam bidang agama maupun dalam bidang ekonomi dan sosial. Guna tercapainya kemaslahatan di bidang agama, maka dilakukan dengan memperbaiki tata cara kehidupan beragama umat manusia. Apabila tujuan ini tidak diperhatikan atau bahkan ditinggalkan, maka dapat menimbulkan kerugian yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan untuk mencapai kemaslahatan ekonomi dan sosial diperoleh melalui pengelolaan keuangan negara (dalam konteks

²⁰Mohammad Abdullah Enan, *Ibn Khaldun: His Life and Work*, (Pakistan: SH. Muhammad Ashraf, 1933), 6–8.

²¹K. Abu-Sayf, "Ibn-Khaldun, Society and Education", dalam *Journal of Thought*, vol. 10, no. 2, 1975, 145.

kepemimpinan suatu negara) untuk kesejahteraan rakyatnya, serta dengan mejamin ketentraman melalui upaya penegakan syari'at Islam.²²

Dalam Islam, pada hakikatnya pemimpin merupakan wakil Allah SWT. dalam menjaga agama dan kehidupan dunia. Seorang pemimpin merupakan pemandu yang harus memiliki kepedulian dengan kesejahteraan pengikutnya. Perhatian utama seorang pemimpin adalah membimbing pengikutnya untuk menuju apa yang baik bagi kehidupan mereka di dunia dan juga kelak di akhirat. Dia harus mampu mengarahkan para pengikutnya untuk mencapai pemahaman visi dalam organisasi kelompok dan bagaimana mereka akan mencapai kesuksesan dalam tugas mereka dengan cara yang terbaik. Bagi seorang pemimpin muslim, penting untuk mengingat bahwa salah satu tugasnya adalah mengarahkan orang-orang bagaimana agar menjadi muslim yang baik di samping menjadi anggota yang baik dalam kelompok.²³

Pada konteks kehidupan masyarakat Arab, bangsa Arab dikenal sebagai bangsa yang masyarakatnya hidup dalam kelompok suku-suku dengan ikatan sosial yang kuat. Berlatar belakang seperti ini, dinamika kepemimpinan yang berkembang dalam masyarakatnya juga tidak lepas dari hal tersebut. Isu kepemimpinan di dunia Arab tradisional menekankan pada kesukuan dan sistem keluarga dalam konsep kepemimpinan lokal. Tonggak dasar kepemimpinan yang penting di kalangan masyarakat Arab ini adalah seorang 'syekh', yaitu seorang laki-laki kepala suku dalam pusat kehidupan masyarakat Arab, serta pemahaman atas status tradisional dan aturan seorang syekh di kalangan masyarakat Arab yang bisa menyediakan wawasan bagi kepemimpinan Arab yang sezaman.

Pada hakikatnya, kepemimpinan adalah suatu sistem yang tercipta dari adanya suatu hubungan. Mengutip dari Abbas J. Ali, Hughes menegaskan bahwa kepemimpinan adalah hasil interaksi antara pemimpin dan pengikutnya. Demikian pula dengan Willner, ia menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu hal yang tidak berdasarkan kepribadian atau ditentukan secara kontekstual tetapi sebagian besar merupakan fenomena relasional dan persepsi. Pendapat Willner ini disetujui oleh Conger dan Kanungo. Para penulis ini menyatakan bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah atribusi yang dibuat oleh para pengikutnya yang mengamati perilaku tertentu dalam suatu bagian dalam diri pemimpinnya dalam konteks organisasi. Mereka menyebut bahwa suatu atribusi atas kharisma seorang pemimpin berdasarkan pada empat hal yang saling berkaitan. Hal-hal itu antara lain meliputi tingkat perbedaan antara status-quo dan tujuan masa depan atau visi yang diperjuangkan oleh pemimpin, penggunaan inovasi dan cara yang tidak konvensional untuk mencapai perubahan yang diinginkan, penilaian sumber daya lingkungan yang realistis serta kendala untuk membawa perubahan seperti itu, dan manajemen kesan yang digunakan untuk menginspirasi pengikut dalam pengejaran visinya.²⁴

Sementara itu, Edwin A. Locke menyebut terdapat tiga elemen penting dalam kepemimpinan, elemen-elemen tersebut yaitu:

Pertama, pemimpin adalah orang yang membuat suatu konsep relasi (*relation concept*). Seseorang dapat disebut sebagai pemimpin ketika orang tersebut memiliki relasi dengan orang lain, dalam hal ini yaitu pengikutnya. Jika tidak memiliki pengikut, maka orang itu tidak bisa disebut pemimpin. Dengan demikian, kepemimpinan yang efektif haruslah mengetahui bagaimana membangkitkan inspirasi dan relasi dengan para pengikutnya.

Kedua, kepemimpinan merupakan suatu proses. Agar terjadi suatu kepemimpinan, seorang pemimpin perlu melakukan suatu tindakan dalam kepemimpinannya. Menduduki suatu posisi otoritas saja tidak dapat dikatakan cukup. Meskipun posisi otoritas berperan penting

²²Ibnu Taymiyah, *Al-Hisbah Fi Al-Islam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1992), 9.

²³Ali Mohammad Jubran, "Educational Leadership: A New Trend That Society Needs", dalam *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, vol. 210, 2015, 31.

²⁴Abbas J. Ali, "Islamic Perspectives on Leadership: A Model", dalam *International Journal of Islamic and Middle Eastern and Management*, vol. 2, no. 2, 2009, 162.

dalam mendorong proses kepemimpinan, namun hal ini belum memadai untuk menjadikan seseorang menjadi pemimpin yang sebenarnya.

Ketiga, seorang pemimpin harus mampu untuk membujuk pengikutnya mengambil suatu tindakan. Bujukan yang dilakukan bisa melalui beragam cara, seperti menciptakan model (teladan), menggunakan otoritas yang terlegitimasi, penerapan sasaran, memberikan imbalan (*reward*) atau hukuman (*punishment*), mengkomunikasikan sebuah visi, dan lain sebagainya.²⁵

Pada dasarnya, terkait masalah kepemimpinan di dalam al-Qur'an sendiri tidak menyebutkan secara rinci seperti apa sistem yang ideal. Akan tetapi, al-Qur'an hanya menekankan pada prinsip-prinsip umum seperti keadilan serta tidak adanya penindasan. Di samping itu, ada aspek yang harus terpenuhi yang merupakan hal fundamental dalam Islam, yaitu tauhid (meng-Esa-kan Allah SWT.) Dalam Islam, kepemimpinan mencakup cara melatih dan menginspirasi para pengikut guna mencapai tujuan semangat kolektif wahyu. Selain itu, seorang pemimpin tidak diperbolehkan mengeksekusi atau memberi putusan atas sesuatu hal karena ia memilih sesuai kehendaknya, dalam artian bukan untuk nafsunya, atau untuk memajukan tujuan organisasi. Ia secara mendasar harus melakukannya hanya untuk Allah SWT.²⁶

Dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh Darwish Almoharby, terungkap bahwa kepemimpinan Islam tidak mengandalkan legitimasinya pada otoritas tradisional, namun lebih pada dukungan rasional hukum yang didasarkan kepada kesatuan tujuan, yaitu pengakuan terhadap satu Tuhan, serta contoh mendasar dari Nabi Muhammad SAW. yang rujukan dan otoritas kharismaniknya hidup dalam diskursus sunnah dan hadis. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperbaiki karakteristik kepemimpinan Islam yang etis dengan penghargaan terhadap prototipe kepemimpinan dalam al-Qur'an, sunnah, dan hadis.²⁷

Adapun teori kepemimpinan Islam sendiri diperoleh dari praktik yang dijalankan masyarakat Islam selama periode Nabi Muhammad SAW. selaku utusan-Nya dan para Khulafaur Rasyidin yang dipercaya sebagai manusia terbaik setelah Rasulullah SAW., khususnya oleh kelompok Sunni. Teori kepemimpinan klasik salah satunya ditemukan dalam literatur *Abkam al-Sulthaniyyah* yang muncul pertama kali pada abad kesebelas. Dalam Islam sendiri, istilah pemimpin seringkali dikenal dengan nama 'khalifah' dan pemerintahannya dikenal dengan 'khalifah'. Di samping istilah 'khalifah', terdapat pula istilah lain, yaitu 'imamah'. Terkait pendefinisian kedua istilah ini, terjadi perbedaan di kalangan para tokoh.

Dalam *Abkam al-Sulthaniyyah* karya al-Mawardi, khalifah didefinisikan sebagai "suksesi dari Nabi SAW., dan dengan demikian meliputi kepemimpinan secara umum atau otoritas tentang masalah agama dan keduniaan". Al-Mawardi memandang hal ini dalam konteks penjagaan agama dan kehidupan. Ini merupakan suatu sistem yang wajib bagi setiap Muslim, karena tanpa kepemimpinan ini manusia akan hidup dalam kegelapan dan agama tidak akan bisa memenuhi fungsinya sebagai petunjuk.²⁸ Pendefinisian ini kemudian berimplikasi pada usulan bahwa pemimpin harus memiliki sikap adil, berpengetahuan luas dan berbudi luhur, serta harus dipilih oleh *Ahl al-Hal Wa al-'Aqd* atau diangkat oleh pemimpin (khalifah) sebelumnya, dan kemudian disetujui oleh komunitas yang hendak dipimpinnnya dengan melalui pembaiatan. Literatur awal ini seringkali menekankan pada keabsahan dan signifikansi dari *khulafaur rasyidin*.²⁹

²⁵Edwin A. Locke, *The Essence of Leadership: The Four Keys to Leading Successfully*, terj. Aris Ananda, (Jakarta: Mitra Utama, 1997), 3.

²⁶Muhammad Yousaf Jamil, "Islamic Perspective of Leadership", dalam *Journal of Islamic Thought and Civilization*, vol. 5, no. 2, September 2015, 27.

²⁷Darwish Almoharby and Mark Neal, "Clarifying Islamic Perspectives on Leadership", dalam *Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues*, vol. 6, no. 3/4, January 2013.

²⁸Ali Mohammad Jubran, "Educational Leadership: A New Trend That Society Needs", 29.

²⁹Nurullah Ardıç, "Genealogy or Asabiyya? Ibn Khaldun between Arab Nationalism and the Ottoman Caliphate", 316.

Pendapat lain juga disampaikan oleh al-Baidhawi, ia memandang bahwa khalifah adalah pengganti Rasulullah SAW. oleh seseorang dari beberapa orang yang wajib diikuti dalam urusan penegakan hukum syari'at dan pemeliharaan hak milik umat.³⁰ Sedangkan menurut al-Maududi, khalifah adalah suatu bentuk pemerintahan manusia yang benar menurut pandangan al-Qur'an, yaitu pengakuan negara atas kepemimpinan dan kekuasaan Allah SWT. dan rasul-Nya dalam hal perundang-undangan, penyerahan segala kekuasaan dan kedaulatan hukum tertinggi, serta meyakini bahwa kepemimpinannya itu mewakili pemimpin yang sebenarnya, yaitu Allah SWT.³¹

Istilah kedua dalam kepemimpinan yang dikenal dalam Islam selain 'khalifah' yaitu 'imamah'. Istilah 'imamah' terambil dari kata 'al-imam'. Menurut Raghīb al-Asfahani, al-imam berarti 'yang diikuti jejaknya', yaitu orang yang didahulukan urusannya, atau perkataannya, atau perbuatannya.³² Terkait istilah ini, terdapat perbedaan keyakinan di antara kelompok sunni dan syi'ah. Kelompok sunni meyakini bahwa imam bermakna sama dengan khalifah. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Sedangkan bagi kelompok syi'ah, imam mencakup hal yang lebih luas. Bagi mereka, imam tidak hanya terkait dengan masalah politik, namun juga mencakup aspek agama secara menyeluruh. Oleh karena itu, imam hanya dikhususkan bagi orang tertentu. Kelompok syi'ah mensyaratkan bahwa seorang imam harus berasal dari *ahl al-bayt*, yaitu mereka yang berasal dari keturunan Rasulullah SAW. melalui jalur Ali bin Abi Thalib. Seorang imam tidak bisa ditentukan berdasarkan ketetapan manusia, namun harus berdasarkan ketetapan Allah SWT. sebagaimana seorang nabi. Mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib telah diangkat oleh Rasulullah SAW. menjadi imam berdasarkan teks-teks yang mereka kutip dan mereka takwilkan sesuai dengan aliran mereka, yang tidak dikenal oleh para ulama' sunni. Bagi seorang imam ini, setidaknya ada tiga sifat yang harus melekat padanya, yaitu merupakan pilihan dan diangkat oleh Allah SWT. bukan kesepakatan masyarakat umum, memiliki keilmuan yang mencakup keseluruhan ilmu yang merupakan ilmu *laduni* dari Allah SWT, serta bersifat *ma'shum* (terjaga) dari kesalahan dan perbuatan dosa.³³

Pandangan Ibnu Khaldun tentang Kepemimpinan

Maha karya Ibnu Khaldun, yaitu *Muqaddimah* secara garis besar memang berkulat dalam hal kehidupan masyarakat dan gejala sosial yang timbul di dalamnya. Begitu pula referensi Ibnu Khaldun tentang kepemimpinan datang dalam konteks analisisnya tentang bagaimana masyarakat berkembang. Dalam menulis tentang masyarakat ini, ia mengeksplorasi alasan orang membutuhkan adanya suatu kepemimpinan. Sementara itu, idenya lebih banyak menekankan politik kepemimpinan dalam entitas sosial. Adapun kesimpulannya dapat diperluas untuk memasukkan kepemimpinan dalam pengaturan organisasi yang bervariasi. Oleh karena itu, untuk mengeksplorasi ide kepemimpinannya, pandangan Ibnu Khaldun tentang sifat manusia pantas mendapat perhatian khusus.³⁴

Dalam Islam, hukum mengangkat seorang pemimpin adalah wajib. Hal ini juga lah yang diyakini oleh Ibnu Khaldun yang sesuai dengan pandangan syari'at dan berdasarkan ijma' (kesepakatan) para sahabat dan tabi'in. Kewajiban ini tercermin dalam sejarah pada waktu wafatnya Rasulullah SAW. di mana pada waktu itu para sahabat bersegera untuk menentukan siapa pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Demikian pula, penggantian

³⁰Nashiruddin Abu Al-Khair Abdullah Al-Baidhawi, *Amwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Ta'wil*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th).

³¹Abu Al-A'la Al-Maududi, *Al-Khalifah Wa Al-Mulke*, Terj. Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1996), 63.

³²Al-Raghīb Al-Asfahani, *Mufradat Al-Fadzḥ Al-Qur'an*, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1992), 87.

³³Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction To History The Classic Islamic History of the World Translated by Franz Rosenthal*, 265.

³⁴Yusuf M. Sidani, "Ibn Khaldun of North Africa: An AD 1377 Theory of Leadership", dalam *Journal of Management History*, vol. 14, no. 1, 2008, 76.

pemimpin pasca wafatnya pemimpin sebelumnya juga terjadi dalam setiap masa setelah masa para sahabat.

Pengangkatan pemimpin juga merupakan bagian dari *maqasyid asy-syariah* (tujuan utama syari'at), yaitu *hifdzun nafs*. Sebab, dengan adanya seorang pemimpin jiwa manusia akan terjaga. Islam sendiri pun tidak pernah membiarkan umat manusia terjerumus dalam hukum rimba, di mana yang terkuat lah yang akan mengalahkan yang lemah. Bahkan sebaliknya, Islam justru memberikan rambu-rambu agar manusia tertata dengan keadaan yang sedemikian rupa. Hal itulah yang kemudian menurut Ibnu Khaldun menjadi *ijma'* yang menunjukkan kewajiban mengangkat seorang pemimpin.³⁵

Menurut sebagian ulama', dasar diwajibkannya mengangkat seorang pemimpin adalah rasionalitas (akal), sementara *ijma'* hanyalah sebagai penguat akal atas masalah ini. Ibnu Khaldun pun condong pada pendapat ini. Menurutnya, dasar argumentasi diwajibkannya pengangkatan seorang pemimpin antara lain bahwa manusia mau tidak mau haruslah hidup bermasyarakat dan tidak mungkin untuk hidup sendirian. Konsekuensi logis dari hidup bermasyarakat ini adalah terjadinya konflik karena keragaman kepentingan dan tujuan dari anggota masyarakat tersebut. Jika tidak ada pengendali atas masyarakat tersebut, maka sangat mungkin terjadi pertumpahan darah dan pada akhirnya menyebabkan kehancuran umat manusia dan kepunahan mereka. Hal inilah yang oleh *maqasyid asy-syariah* benar-benar dijaga.

Ibnu Khaldun menolak pendapat sebagian pihak yang mengatakan bahwa mengangkat seorang pemimpin tidak penting sama sekali, baik itu berdasarkan pada rasionalitas akal maupun petunjuk syari'at. Menurut mereka, yang menjadi kewajiban adalah menerapkan hukum dan syari'at. Pendapat ini di antaranya dikemukakan oleh Al-Ashamm dari kalangan Mu'tazilah, serta beberapa orang Khawarij. Anggapan mereka, apabila suatu bangsa telah menerapkan sistem keadilan dan melaksanakan hukum-hukum Allah SAW., maka pemimpin sudah tidak dibutuhkan lagi yang berarti tidak ada pula keharusan untuk mengangkatnya.

Sebenarnya, penolakan sebagian kelompok tersebut hanyalah bentuk sikap skeptis mereka karena berupaya untuk melepaskan diri dari kekuasaan dan karakternya yang cenderung merebut, menguasai, dan tenggelam dalam kenikmatan dunia. Mereka berpendapat bahwa karakter yang demikian ini dicela oleh syari'at dan dianjurkan untuk memerangnya. Padahal, sesungguhnya syari'at tidak mencela kekuasaan itu sendiri dan tidak melarang penegakannya. Namun, syari'at hanya mencela kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan seperti pemaksaan, kezaliman, dan tenggelam dalam kesenangan dunia apabila kekuasaan itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Di sisi lain, syari'at juga memuji sifat keadilan, toleransi, penegakan ajaran-ajaran agama dengan segala tradisinya, dan menjalankannya dalam realitas kehidupan yang mengharuskan adanya pahala yang semua hal tersebut merupakan konsekuensi dari kekuasaan. Dengan demikian, syari'at hanya mencela kekuasaan dengan karakter tertentu saja. Dalam konteks Islam, seperti yang dikutip oleh Abbas Zaidi dari Akbar S. Ahmed, Ibnu Khaldun sendiri menjelaskan posisi pemimpin dalam harison keislaman adalah bahwa seharusnya seorang pemimpin mewujudkan otoritas politik maupun moral, di mana kondisi umat perlu untuk dibimbing oleh pemimpin yang cakap.³⁶

Suatu kepemimpinan dapat diraih melalui adanya supremasi. Sementara supremasi hanya dapat dicapai dengan fanatisme. Dengan demikian, kepemimpinan atas suatu kaum haruslah berasal dari kelompok yang memiliki supremasi atas kelompok-kelompok lain secara keseluruhan. Dengan begitu, mereka akan tunduk dan patuh pada pemimpinnya.³⁷

³⁵Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction To History The Classic Islamic History of the World Translated by Franz Rosenthal*, 259.

³⁶Syed Manzar Abbas Zaidi, "Tribalism, Islamism, Leadership and the Assabiyyas", dalam *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, vol. 9, no. 25, October 2010, 138.

³⁷Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction To History The Classic Islamic History of the World Translated by Franz Rosenthal*, 178.

Dengan kata lain, kemunculan pemimpin tidak dapat dilepaskan dari adanya *asabiyyah*. Kelompok ini memiliki peranan penting dalam pengembangan masyarakat. *Asabiyyah* sebagian besar ditemukan di antara orang-orang yang berasal dari ikatan darah atau suku yang sama. Di antara merekalah superioritas terbentuk dari perasaan kelompok.

Perasaan kelompok idealnya ada dalam setiap kepemimpinan yang muncul. Ketika otoritas ditetapkan melalui *asabiyyah*, kepemimpinan berkembang menjadi kekuatan yang sah, dan peran *asabiyyah* perlahan-lahan berkurang. Di sinilah pentingnya perasaan kelompok. Ketika masyarakat suku berubah menjadi lebih beradab dan pemimpin suku menjadi lebih seperti seorang raja, *asabiyyah* kehilangan signifikansinya. Ketika suatu masyarakat bergerak dari suatu struktur kesukuan pada bentuk masyarakat yang menetap, ia biasanya menyaksikan disintegrasi *asabiyyah*. Kemampuan seorang pemimpin untuk mengumpulkan dukungan melalui perasaan kelompok melemah dan ia hanya mempertahankan kekuatannya melalui upaya untuk memperoleh otoritas kerajaan atau kekuasaan yang diperoleh dari suatu jabatan.³⁸

Di samping *asabiyyah*, ada hal lain yang penting bagi tegaknya kepemimpinan, yaitu agama. Ibnu Khaldun memandang bahwa secara umum agama memiliki daya pemersatu kelompok yang bisa memperkuat *asabiyyah*. Agama memiliki peran untuk memperkokoh solidaritas kelompok yang memungkinkan sebuah kerajaan terbangun. Oleh karena segala tindakan anggota kelompok diatur oleh keyakinan agama maka tabiat kebinatangannya akan terkendali.³⁹ Meskipun pada kenyataannya terdapat kelompok yang tanpa agama dapat menciptakan solidaritas sosial, namun Ibnu Khaldun tetap menganggap agama sebagai pemersatu kelompok. Bahkan menurutnya solidaritas yang dihasilkan oleh agama jauh lebih kuat daripada yang hanya dihasilkan oleh *asabiyyah*.⁴⁰

Kriteria Pemimpin Menurut Ibnu Khaldun

Mengangkat seorang pemimpin telah menjadi *ijma'* berdasarkan aturan syari'at sesuai apa yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Hukum pengangkatan tersebut adalah fardu kifayah. Pengangkatan pemimpin diserahkan kepada para dewan sebagai wakil masyarakat (*ahl al-hal wa al-aqd*). Mereka berkewajiban memilih dan mengangkat pemimpin, dan seluruh masyarakat wajib mematuhi. Hal ini sesuai dengan kandungan ayat al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kalian semua” (QS. An-Nisa': 59)

Dalam mengangkat seorang pemimpin, tidak setiap orang bisa dipilih hanya berdasarkan kemauan saja. Mereka yang terpilih harus memiliki kecakapan-kecakapan untuk mengatur masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Kecakapan-kecakapan tersebut dibutuhkan guna meraih tujuan yang hendak dicapai oleh syariat seperti menjaga persatuan dan menghindarkan dari beragam konflik. Terkait syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi pemimpin, Ibnu Khaldun mengajukan beberapa kriteria. Kriteria-kriteria tersebut antara lain:

a. Memiliki ilmu pengetahuan

Seorang pemimpin haruslah memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Hal ini karena dia bertanggung jawab menerapkan hukum-hukum Allah sehingga dia harus mengetahui hukum-hukum itu dengan baik. Adapun orang yang tidak mengetahui ajaran agama dan hukum-hukum Allah maka ia tidak layak diangkat menjadi seorang pemimpin. Menurut Ibnu Khaldun sendiri, seseorang belum bisa dikatakan sebagai orang yang berilmu kecuali ia sudah mencapai tingkat mujtahid. Sebab, orang yang bukan mujtahid ia masih melakukan

³⁸Yusuf M. Sidani, “Ibn Khaldun of North Africa: An AD 1377 Theory of Leadership,” 79.

³⁹H.A R. Gibb, *Studies in Civilization of Islam*, (London: Routledge & Kegan Paul, 1962), 173.

⁴⁰Barbara Freyer Stoasser, “Agama Dan Perkembangan Politik Menurut Ibnu Khaldun”, dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*, vol. 5, no. 3, 1994, 71.

taklid dan taklid digolongkan sebagai kekurangan. Sedangkan kepemimpinan menuntut kesempurnaan dalam berbagai karakter dan perbuatan.

Kategori berilmu dalam pembahasan ini menggandung perbedaan dengan sifat “cerdas”. Di dalam karyanya *al-Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menerangkan bahwa justru tidak baik apabila mengangkat pemimpin yang terlalu cerdas. Menurutnya, sebaiknya seorang pemimpin merupakan orang dengan kecerdasan standar. Hal ini karena orang dengan kecerdasan sangat tinggi dinilai seringkali kurang memiliki sikap keramahan dan kelembutan. Sehingga, nantinya dapat membebani rakyatnya melebihi kemampuan dan kapasitas mereka. Dasar pengambilan hukum ini adalah sebuah kisah dari Ziyad bin Abi Sufyan yang pernah diberhentikan dari kedudukannya sebagai gubernur Irak oleh Umar, yang kemudian menanyakan alasan pemberhentiannya apakah karena ia dianggap berkhianat atau karena kebodohnya. Kemudian Umar menjawab, “Aku tidak memberhentikanmu karena salah satu dari kedua alasan tersebut, tapi karena aku tidak ingin membebani rakyat dengan kecerdasan pikiranmu.” Atas dasar kisah inilah kemudian diambil kesimpulan hendaknya seorang penguasa tidak memiliki kecerdasan yang berlebihan dan ketajaman pemikiran.⁴¹

b. Mampu berbuat adil

Keadilan yang dimaksud dalam hal ini yaitu yang berintegritas baik. Hal ini disyaratkan karena seorang pemimpin atau khalifah merupakan jabatan keagamaan yang harus mengontrol jabatan-jabatan lain. Hal ini sebagaimana praktik yang terjadi pada masa Ibnu Khaldun sendiri, yang juga mengharuskan kriteria keadilan ini, sehingga hal ini lebih diutamakan. Dengan demikian, orang-orang fasik tidak diperbolehkan untuk diangkat menjadi pemimpin. Sebab, para ulama’ bersepakat bahwa sifat keadilan tidak dimiliki oleh mereka yang terbiasa melakukan perbuatan terlarang atau sejenisnya. Sedangkan terhadap orang-orang yang melakukan bid’ah, ulama’ berbeda pendapat terkait dengan keadilannya, dalam artian ada yang mengatakan bahwa mereka tetap dapat dikategorikan sebagai orang yang adil dan ada yang menolak keadilannya.

c. Memiliki kompetensi

Syarat kompetensi merupakan suatu hal yang mutlak bagi seorang pemimpin. Apabila seorang pemimpin tidak memiliki *skill* kepemimpinan, ia akan direpotkan sendiri dengan masyarakat yang harus diurusnya. Tanpa memiliki kompetensi yang memadai, seorang pemimpin tidak akan bisa menegakkan hukum. Pada masa Islam awal, penting bagi pemimpin untuk mengetahui kapan harus mendeklarasikan perang, memahami situasi dan strategi perang, serta mampu menghadapi krisis politik dan segala konsekuensinya. Dengan memiliki beragam kompetensi menjadikan pemimpin mampu untuk menjaga agama, menegakkan hukum-hukum Allah SAW., memerangi musuh, dan mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat umum.

d. Sehat jasmani dan rohani

Syarat yang keempat ini merupakan syarat kesempurnaan. Syarat ini dibebankan karena berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan bagi seorang pemimpin. Kriteria sehat jasmani dan rohani ini meliputi hal-hal yang tergolong dalam kecacatan seperti bebas dari penyakit gila, buta, dungu, dan tuli. Termasuk juga segala cacat fisik yang berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin, seperti kehilangan kedua tangan atau kedua kaki. Termasuk dalam hal ini juga adalah kecacatan yang mengganggu pandangan saja, misalnya kehilangan salah satu anggota tubuh.

Di dalam karyanya *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun memberikan keterangan lebih lanjut terkait pembahasan ini. Menurutnya, ketidakberdayaan bertindak dapat disamakan dengan orang yang mengalami cacat fisik. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun membaginya menjadi dua macam. Kategori yang pertama memiliki konsekuensi tidak bolehnya orang tersebut

⁴¹Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction To History The Classic Islamic History of the World Translated by Franz Rosenthal*, 332.

diangkat menjadi pemimpin. Di antara yang termasuk dalam kategori pertama ini yaitu paksaan atau ketidakmampuan bertindak secara keseluruhan karena berada di bawah tekanan atau sejenisnya. Sedangkan kategori yang kedua yaitu pemaksaan karena penguasaan beberapa orang yang mendukungnya tanpa unsur pembangkangan atau ketidakpatuhan, sementara kategori yang pertama tadi bisa jadi memiliki unsur pembangkangan atau ketidakpatuhan. Dengan begitu, kekuasaan yang dipegang seorang pemimpin tersebut berpindah pada orang yang merebutnya.

e. Memiliki garis keturunan dari suku Quraisy

Kriteria ini didasarkan atas *ijma'* para sahabat ketika mereka berada di Tsaqifah Bani Sa'idah. Pada saat itu kaum Quraisy menentang kaum Anshar yang hendak membaiai Sa'ad bin Ubadah menggantikan Rasulullah SAW. Penentangan yang mereka lakukan didasarkan atas hadits Rasulullah SAW. yang mengatakan bahwa kepemimpinan semestinya berasal dari kaum Quraisy. Akan tetapi, belakangan kriteria ini dipertimbangkan kembali oleh para ulama' sebab ketika kaum Quraisy mulai melemah keimanannya, mereka tenggelam dalam kemewahan hidup dengan segala kenikmatannya, Sehingga, mereka tidak mampu memegang kendali dan tugas kekhalifahan. Hal ini berakibat mereka berhasil dikalahkan oleh bangsa-bangsa non-Arab. Kenyataan ini merubah pandangan para ulama' bahwa memiliki garis keturunan dari suku Quraisy tidak termasuk dalam kriteria bagi seseorang untuk diangkat menjadi pemimpin. Salah satu yang menyampaikan pendapat ini yaitu Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Menurut pendapat pribadi penulis, untuk kriteria ini sendiri hanya relevan dikaitkan dengan pengangkatan pemimpin masa kejayaan Islam di abad pertengahan, tidak untuk kepemimpinan pada umumnya.

Pensyaratan nasab atau garis keturunan sendiri sebenarnya dilatar belakangi oleh fanatisme atau perasaan kelompok. Sikap fanatisme ini biasanya dimiliki oleh kelompok yang Ibnu Khaldun menyebutnya sebagai *asabiyyah*. Menurut Ibnu Khaldun, fanatisme dirasa penting dalam masalah kepemimpinan karena melalui fanatisme terdapat perlindungan, kemampuan mengajukan tuntutan, serta menghapus konflik dan perpecahan jika fanatisme ini dimiliki oleh orang yang menduduki jabatan kepemimpinan. Seandainya kepemimpinan diserahkan kepada pihak yang memiliki fanatisme rendah, diprediksi akan terjadi perpecahan sebab adanya pembangkangan terhadap mereka dan akan timbul sikap tidak mau tunduk dan patuh pada penguasa.

Suku Quraisy terpilih untuk memenuhi syarat ini berlandaskan fakta bagaimana pengaruh serta kekuatan yang dimiliki oleh suku Quraisy sendiri. Hal ini disebabkan karena suku Quraisy tidak lain merupakan bagian dari suku Mudhar dan nenek moyang mereka, yang memiliki keperkasaaan. Suku Quraisy memiliki kehormatan yang lebih tinggi dibandingkan suku-suku Mudhar lainnya dengan jumlah anggota dan fanatisme yang tinggi. Dengan begitu, mayoritas suku bangsa Arab mengakui kemuliaan mereka dan mereka merasa tentram berada di bawah kekuasaannya.⁴²

Akan tetapi, pada kondisi-kondisi tertentu fanatisme ini bisa jadi tidak dibutuhkan lagi. Ibnu Khaldun menggambarkan kondisi yang dimaksud ini adalah ketika kepemimpinan telah stabil dan keyakinan agama telah menancap kuat dalam diri pemimpinnya. Belakangan, syarat ini telah dihapus oleh para ulama' sunni seperti al-Jurjani dan al-Baqillani. Mereka berpendapat bahwa aturan tersebut hanyalah berlaku untuk masa Rasulullah SAW. dan empat khalifah pertama. Ibnu Khaldun secara khusus berpendapat bahwa alasan Rasulullah SAW. menyebut suku Quraisy dalam hadits terkait *asabiyyah* di mana pada waktu itu Makkah merupakan satu-satunya yang memiliki pemerintahan yang cukup kuat untuk menyatukan semua suku lain dan dengan demikian dapat mempersatukan komunitas muslim. Maka,

⁴²Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, terj. Masturi Ilham, dkk, 346.

setelah suku Quraisy tidak lagi menjadi kelompok yang dominan di dunia Muslim hadits ini tidak lagi berlaku.⁴³

Kesimpulan

Sebagai seorang sosiolog, filsuf, dan ahli sejarah, Ibnu Khaldun memiliki pandangan-pandangan yang luas dan tajam dalam menyikapi persoalan-persoalan sosial, tak terkecuali tentang kepemimpinan. Pandangan-pandangannya tersebut terangkum dalam karya *master piece*-nya, yaitu *Muqaddimah*. Dalam Islam, kepemimpinan merupakan suatu hal yang wajib. Hal ini disetujui pula oleh Ibnu Khaldun. Kepemimpinan dibutuhkan tidak lepas dari kebutuhan manusia akan rasa aman dan mewujudkan kemashlahatan di tengah masyarakat. Kepemimpinan sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Ibnu Khaldun merupakan hasil pengamatan dan analisisnya atas fenomena yang terjadi pada masa ia hidup. Menurut Ibnu Khaldun, kepemimpinan dapat diraih melalui adanya supremasi yang hanya dapat diraih dengan fanatisme. Fanatisme ini terbentuk di kalangan *asabiyyah*. Supremasi ini penting supaya orang-orang mau tunduk dan patuh pada pemimpinnya. Di samping *asabiyyah*, agama juga berperan dalam tegaknya kepemimpinan. Bahkan menurut Ibnu Khaldun, solidaritas yang dihasilkan oleh agama jauh lebih kuat daripada yang hanya dihasilkan oleh *asabiyyah*. Meskipun demikian, kepemimpinan tak cukup hanya berdasar pada fanatisme belaka, Ibnu Khaldun juga memberikan beberapa kriteria bagi seorang pemimpin, di antaranya memiliki ilmu pengetahuan, mampu berbuat adil, berkompentensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki garis keturunan dari suku Quraisy. Untuk kriteria yang terakhir ini belakangan dipertimbangkan kembali oleh para ulama karena kriteria terakhir ini dinilai hanya cocok diterapkan untuk masa Rasulullah SAW. dan empat khalifah pertama.

Daftar Pustaka

- Abu-Sayf, K. (1975). "Ibn-Khaldun, Society And Education". *Journal of Thought*. Vol. 10, No. 2.
- Al-Asfahani, Al-Raghib. (1992). *Mufradat Al-Fadzih Al-Qur'an*. Damaskus: Dar Al-Qalam.
- Al-Baidhawi, Nashiruddin Abu Al-Khair Abdullah. (t.th.). *Anwar Al-Tanzil Wa Asrar Al-Ta'wil*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Ali, Abbas J. (2009). "Islamic Perspectives on Leadership: A Model." *International Journal of Islamic and Middle Eastern and Management*. Vol. 2, No. 2.
- Al-Maududi, Abu Al-A'la. (1996). *Al-Khalifah Wa Al-Mulk*. Terj. Muhammad Al-Baqir. Bandung: Mizan.
- Almoharby, Darwish, and Mark Neal. (2013) "Clarifying Islamic Perspectives on Leadership." *Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues*. Vol. 6, No. 3/4. January.
- Alrefai, Ahmed, and Michael Brun. (1994). "Ibn Khaldun: Dynastic Change And Its Economic Consequences." *Arab Studies Quarterly*. Vol. 16, No. 2.
- Ardıç, Nurullah. (2012). "Genealogy or Asabiyya? Ibn Khaldun between Arab Nationalism and the Ottoman Caliphate." *Journal of Near Eastern Studies*. Vol. 71, No. 2.
- Busch, Briton Cooper. (1968). "Divine Intervention in the 'Muqaddimah' of Ibn Khaldun." *History of Religions*. Vol. 7, No. 4.
- Enan, Mohammad Abdullah. (1933). *Ibn Khaldun: His Life and Work*. Pakistan: SH. Muhammad Ashraf.
- Gupta, I.P. (1989). "Conceptualising 'The Urban': Ibn-Khaldun And The Urban Settlements In Medieval India With Special Reference To The 16th And 17th Century". *Proceedings of the Indian History Congress*. Vol. 50.
- Hopkins, Nicholas S. (1990). "Engels and Ibn Khaldun / إنغلز وابن خلدون". *Alif: Journal of Comparative Poetics*. No. 10.

⁴³Nurullah Ardıç, "Genealogy or Asabiyya? Ibn Khaldun between Arab Nationalism and the Ottoman Caliphate," 2012, 316.

- Jamil, Muhammad Yousaf.(2015). "Islamic Perspective of Leadership". *Journal of Islamic Thought and Civilization*. Vol. 5. No. 2. September.
- Jubran, Ali Mohammad. (2015). "Educational Leadership: A New Trend That Society Needs". *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. Vol. 210.
- Kamaruddin. (2015). "Pemikiran Politik Ibnu Khaldun Dan Pembentukan Teori Sosiologi Politik". *Jurnal Ilmu Agama UIN Raden Fatah*. Vol.16, No. 2.
- Kayapinar, M. Akif. (2008). "Ibn Khaldun's Concept of 'Assabiyya': An Alternative Tool for Understanding Long-Term Politics?". *Asian Journal of Social Science*. Vol. 36, No. 3/4. Januari.
- Khaldun, Ibnu. (2019). *Mukaddimah Ibnu Khaldun*. Terj. Masturi Ilham, dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- . (t.th). *The Muqaddimah: An Introduction To History The Classic Islamic History of the World Translated by Franz Rosenthal*. Princeton University Press.
- Korkut, Şenol. (2008). "Ibn Khaldun's Critique of the Theory of 'al-Siyâsah al-Madaniyyah". *Asian Journal of Social Science*. Vol. 36, No. 3/4.
- Locke, Edwin A. 1997. *The Essence of Leadership: The Four Keys to Leading Successfully*. Terj. Aris Ananda. Jakarta: Mitra Utama.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. (1996) *Ibn Khaldun Dalam Pandangan Penulis Barat Dan Timur*. Jakarta: Gema Insani Press.
- . (1993) *Peta Bumi Intelektual Islam Di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Pohan, Jusrin Efendi.(2016) "Mengakar Karya Ilmiah (Menulis Skripsi Kualitatif, Kuantitatif, Dan Penelitian & Pengembangan)". *Logaritma : Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Sains*. Vol. 4, No. 01. June.
- R. Gibb, H.A. 1962. *Studies in Civilization of Islam*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Sidani, Yusuf M. (2008). "Ibn Khaldun of North Africa: An AD 1377 Theory of Leadership". *Journal of Management History*. Vol. 14, No. 1.
- Sorokin, Pitirim. A. (1966) *Sociological Theories of Today*. New York and London: Harper & Row.
- Stoasser, Barbara Freyer. (1994). "Agama Dan Perkembangan Politik Menurut Ibnu Khaldun". *Jurnal Ulumul Qu'an*. Vol. 5, No. 3.
- Taymiyah, Ibnu. (1992). *Al-Hisbah Fi Al-Islam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Tomar, Cengiz. (2008). "Between Myth and Reality: Approaches to Ibn Khaldun in the Arab World". *Asian Journal of Social Science*. Vol. 36, No. 3–4. January.
- Zaidi, Syed Manzar Abbas. (2010) "Tribalism, Islamism, Leadership and the Assabiyyas". *Journal for the Study of Religions and Ideologies*. Vol. 9, No. 25. Oktober.